



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2 - 4 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3449230 (20 SALURAN) PSW 5418, 5419, (021) 3456547, FAKSIMILI (021) 3459617
SITUS www.djpb.kemenkeu.go.id

Nomor : S-9013 /PB/2017
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Ketidakpatuhan KPPN dalam Melakukan
PPR/Approval SP2D

13 Oktober 2017

Yth. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sebagaimana Terlampir
Di seluruh Indonesia

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor: S-4962/PB/2017 tanggal 2 Juni 2017 hal Kepatuhan KPPN dalam Pemilihan *Paygroup* dan *Approval* SP2D serta Pengaturan SP2D dengan *Payment Method Swift*, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan data PPR/Approval SP2D yang dilakukan oleh KPPN untuk periode bulan Januari s.d. September 2017 dari Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (daftar terlampir), ditemukan ketidakpatuhan beberapa KPPN dalam melakukan PPR/Approval SP2D, yaitu PPR/Approval SP2D tanggal H+0 dilakukan di atas pukul 15.00 WIB.
2. Ketidakpatuhan PPR/Approval SP2D tersebut mengakibatkan:
 - a. Ketidakakuratan penyediaan/*dropping* dana ke Bank Operasional I Pusat oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
 - b. Meningkatnya permintaan penyediaan/*dropping* dana secara manual di luar batch.
 - c. Meningkatnya volume transaksi SP2D *reject*.
3. Agar permasalahan dimaksud tidak berulang, diminta bantuan Saudara agar:
 - a. Melakukan teguran dan pemberitahuan kembali kepada KPPN di wilayah kerja Saudara agar lebih teliti dalam melakukan PPR/Approval SP2D yaitu paling lambat pukul 15.00 WIB untuk penerbitan SP2D tanggal H+0.
 - b. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada KPPN terkait kepatuhan dalam melakukan PPR/Approval SP2D tersebut.
 - c. Melaporkan tindak lanjut penyelesaian atas permasalahan dimaksud kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara melalui email: mppk.mrpengeluaran@gmail.com (dalam rangka mendukung gerakan *go green*, *hardcopy* tidak perlu dikirimkan).

Demikian disampaikan, agar menjadi perhatian.

A.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan
Direktur Pengelolaan Kas Negara


Rudy Widodo
NIP. 195901241985011001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan
3. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
4. Kepala KPPN di Seluruh Indonesia

DAFTAR KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN

1. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NAD
2. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau
3. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten
4. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat
5. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur
6. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah
7. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan
8. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan
9. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat
10. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara